KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ayo Kemenhut, fokus selesaikan persoalan
Tanggal : Senin, 22 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Buktikan Keseriusan, Senayan Beri Motivasi

Ayo Kemenhut, Fokus Selesaikan Persoalan

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) fokus menyelesaikan satu kasus kehutanan secara tuntas sebagai proyek percontohan. Penyelesaian konkret ini akan memberikan bukti nyata kepada masyarakat bahwa Pemerintah serius menuntaskan persoalan kehutanan.

Alex mengatakan, Indonesia memiliki wilayah yang luas. Namun, di saat yang sama, problem yang dimiliki juga sangat kompleks. Untuk itu, dia meminta Kemenhut menyelesaikan minimal satu persoalan. Contohnya, kasus anak gajah mati di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, yang cukup jadi sorotan.

"Tuntaskan setuntas-tuntasnya, sehingga ketika persoalan datang, pengaduan berikutnya datang, kita sudah menunjukkan keseriusan. Oh, ini sudah kami selesaikan," tegas anggota Fraksi PDIP itu dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).

Alex menilai, pola kerja kementerian selama ini terlalu banyak berfokus pada perencanaan tanpa diikuti eksekusi hingga tuntas. Sementara, persoalan akan terus muncul. "Belum soal lahan transmigrasi yang kemudian jadi kawasan hutan, memang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Ayo fokus, satu kita selesaikan," ucapnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar Kemenhut tidak menambah persoalan baru dengan memberikan izin pemanfaatan hutan di pulau-pulau kecil. Contohnya, kasus pemberian izin di Pulau Sipora, Provinsi Sumatera Barat, yang memanfaatkan hutan hingga sepertiga dari pulau tersebut. "Kalau begitu namanya nambah masalah," katanya.

Alex Indra Lukman

Senada, anggota Komisi IV DPR Alien Mus menyoroti permasalahan pelepasan kawasan hutan yang dialihfungsikan untuk kepentingan desa maupun hutan adat. Pemerintah Pusat dan Daerah diminta lebih serius dalam menyelaraskan tata ruang agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

"Tahun 2022-2023 kemarin juga kami mengalami hal yang sama tentang bagaimana pelepasan kawasan hutan dialihfungsikan kepada pedesaan, atau di situ juga ada hutan adat," ujar Alien.

Dia juga meminta Pemerintah membuat peta jalan atau roadmap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dari gubernur dan bupati atau wali kota. Dari peta tersebut akan terlihat siapa yang mengeluarkan izin dan apakah penerbitannya untuk kawasan hutan atau untuk pemukiman. "Ini banyak sekali terjadi, tolong diminta. Saran saya seperti itu, biar cepat," tegasnya.

Selain itu, Alien juga menyinggung maraknya isu pembukaan lahan untuk pertambangan di luar izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut diminta menyerahkan data pelepasan kawasan hutan dari tahun 2020 hingga 2025, untuk memastikan kepatuhan aturan.

"Sehingga kita mengetahui persis, apakah yang dilakukan Satgas benar atau tidak, baik dari pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit. Karena Komisi IV berfungsi sebagai pengawasan," tegas politikus Partai Golkar itu.

Terkait hal tersebut, Menhut Raja Juli Antoni sepakat dengan masukan Alien. Dia ingin ada pembaruan tata ruang di daerah. Secara khusus, Raja menyebut kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), agar kebijakan pelepasan kawasan hutan lebih tepat sasaran.

"Saya setuju Bu Alien tentang tata ruang. Kalau kita ingin lebih konsisten bekerja untuk merapikan itu, maka harus ada perubahan tata ruang," ujar politikus PSI itu.

Menurut Raja, pembaruan tata ruang harus melibatkan lintas sektor, termasuk ATR/BPN. Dengan demikian, Pemerintah bisa memetakan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) secara lebih baik dan sesuai perkembangan terbaru. ■ PYB